BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tersangka ialah seseorang yang diduga telah menyebabkan suatu tindak pidana terjadi. Tersangka diposisikan sebagai pihak yang belum tentu bersalah atas tindak pidana yang telah terjadi tetapi telah cukup bukti atau alasan untuk diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Pada penjelasan secara yuridis ini, seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan oleh kepolisian.

Penetapan tersangka oleh lembaga pranata hukum seperti kepolisian pada penyidikan perkara tindak pidana umum maupun khusus ataupun kejaksanaan untuk proses penyidikan perkara tindak pidana khusus haruslah tetap mengacu pada KUHAP disamping dinamika perkembangan hukum acara pidana pasca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki irisan dengan kompetensi pranata praperadilan.¹

¹ Shandy Herlian Firmansyah dan Achmad Miftah Farid, “Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka”, *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 3 No. 2, September 2022*, hal. 90-103.

Praperadilan berdasarkan KUHAP dimaknai sebagai bentuk wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengenai: a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasca beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, berikutnya terdapat pergeseran paradigma hukum terkait kompetensi praperadilan yang sebelumnya telah ditentukan dalam KUHAP. Khusus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dimana dalam putusan tersebut diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukum dari majelis hakim konstitusi bahwa penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan hak asasi manusia, maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar pranata praperadilan. Hal ini semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada

kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya.

Kemudian penetapan tersangka sebagai produk hukum dari proses penyidikan tentunya harus berlandaskan pada nilai-nilai pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dengan cara aparat penegak hukum tidak berlaku sewenang-wenang dalam melakukan tindakan dan membuat keputusan berupa penetapan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana.² Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, setidaknya penyidik harus dibekali keterampilan dan daya profesionalisme yang tinggi untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Berangkat dari pandangan normatif mengenai penetapan tersangka tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji satu proses penanganan perkara tindak pidana umum yaitu tindak pidana perzinahan berdasarkan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana salah satu tersangkanya masih dalam kategori anak. Kajian pendekatan kasus ini kemudian menjadi lebih menarik, dikarenakan selain penanganan perkara tindak pidana umum berupa tindak pidana perzinahan, disaat yang sama pula proses penanganan perkara tindak pidana khususnya yaitu tindak pidana pencabulan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

² Bahran, "Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Journal of Islamic and Law Studies Vol. 5 No. 2 Tahun 2021*, hal. 303-316.

diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak) juga berjalan, dimana anak yang sebelumnya telah ditetapkan menjadi tersangka pada proses penanganan perkara tindak pidana perzinahan, malah dalam penanganan perkara tindak pidana pencabulan anak, justru si anak yang dijadikan korban.

Proses penanganan perkara tindak pidana perzinahan dan pencabulan anak tersebut terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Halmahera Utara pada tahun 2022. Dimana dua perkara tersebut bermula dari pelaporan orang tua si anak ke pihak kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan medis bahwa anak telah dicabuli oleh seorang laki-laki yang merupakan guru dari si anak di sekolahnya. Pengembangan perkara pun dilakukan oleh penyidik kepolisian untuk memeriksa dugaan terjadinya tindak pidana pencabulan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76E juncto Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Pada prosesnya kemudian, ditetapkanlah si laki-laki menjadi tersangka perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Pasca ditetapkannya si laki-laki menjadi tersangka perkara tindak pidana pencabulan anak, kemudian isteri dari si laki-laki tersebut mengajukan laporan atas dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan suaminya dengan si anak

korban tindak pencabulan tadi. Pengembangan perkara pun dilakukan oleh penyidik di Polres Halmamera Utara hingga pada peningkatan status tersangka si laki-laki dan si anak menjadi tersangka tindak pidana perzinahan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 284 KUHP. Dikarenakan tindak perzinahan tergolong sebagai delik aduan absolut yang mana hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari diri korban, maka dalam kasus perzinahan jika seorang isteri mengadukan suaminya berzinah dengan perempuan terdapat konsekuensi hukum dimana ia tidak hanya dapat menuntut si perempuannya tetapi suaminya juga akan turut serta sebagai pelaku tindak pidana perzinahan.³ Dengan demikian, delik dengan aduan absolut mengakibatkan adanya suatu sanksi hukum yang selama proses tuntutananya tidak boleh dilakukan pemisahan antara pelaku tindak pidana satunya dengan pelaku tindak pidana lainnya.

Atas penetapan status tersangka dari si anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana perzinahan maka kemudian si anak mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka pada dirinya yang kemudian dalam putusannya, hakim tunggal praperadilan melalui Putusan Nomor 3/Pid-Pra/2023/PN Tob di Pengadilan Negeri Tobelo menolak seluruhnya permohonan si anak. Dengan begitu, status penetapan tersangka si anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan tetap dinilai sah dan tidak terdapat cacat formil dalam hal penetapan tersangka berdasarkan hukum acara pidana.

Dari fenomena proses penanganan perkara tindak pidana pencabulan anak dan tindak pidana perzinahan di atas nampak kegagalan atas penetapan

³ Petrus Faot, dkk, 2024, "Kasus Kasus yang Menguntungkan Delik Aduan Absolut dan Delik Aduan Relatif dalam Hukum Pidana", *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, Vol, 15 No. 7, hal. 11.

tersangka si anak di perkara tindak pidana perzinahan karena di sisi lain si anak pun diposisikan sebagai korban tindak pidana pencabulan anak untuk satu rangkaian perbuatan pidana yang sama. Paradigma berlakunya UU Perlindungan Anak sejatinya ditujukan untuk dapat menjadi instrumen hukum yang menunjang terwujudnya perlindungan anak terlebih perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Bila diinterpretasikan secara sistematis, UU Perlindungan Anak tidak mengenal istilah “suka sama suka” untuk persetujuan dan/atau pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban sekalipun anak yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Bangunan penafsiran hukum ini tertuang dalam pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 157/Pid.B/2011/PN Pangkajene,⁴ dimana majelis hakim menekankan bahwa norma utama yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak yang menjadi aturan yang didakwakan dalam perkara *a quo* berbeda normanya dengan ketentuan dalam KUHP terkait dengan masalah tindak pidana kesusilaan. Pada bagian lain pertimbangannya, majelis hakim menyebutkan bahwa UU Perlindungan Anak merupakan dasar hukum yang melindungi anak dari segala perbuatan persetujuan, baik itu karena “suka sama suka”, pembujukan, terlebih bila ada unsur pemaksaan atau kekerasan.

Kembali pada proses dua penanganan perkara di atas dalam perkembangannya kemudian tersangka si laki-laki diajukan di persidangan dengan dakwaan dan tuntutan yang dinilai oleh majelis hakim telah terbukti secara sah

⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/persetubuhan-anak-dibawah-18-tahun-dengan-orang-dewasa-lt50692e475ef42/>. Diakses pada 12 Oktober 2024.

dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan telah dijatuhi putusan pemidanaan. Disisi lain, proses penanganan perkara tindak pidana perzinahannya sampai sekarang belum mengalami perkembangan, dikarenakan dari pihak jaksa masih meneliti kelayakan kasusnya apakah bisa ditingkatkan untuk kemudian perkaranya juga bisa diajukan ke tahap persidangan (P-21). Hingga saat ini, si anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang telah terbukti di persidangan masih berstatuskan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana perzinahan.

Berangkat dari proses dua penanganan perkara di atas yang dilakukan oleh Polres Halmahera Utara, penulis mengajukan beberapa isu hukum mengenai kepastian hukum penetapan tersangka si anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan. Mengingat pada perkara lainnya, si anak diposisikan sebagai korban tindak pidana pencabulan yang telah terbukti dilakukan oleh si laki-laki berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Isu hukum lainnya ialah mengenai langkah hukum seperti apa yang dapat dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam menanggapi proses penanganan perkara tindak pidana perzinahan, mengingat si anak sampai sekarang masih dalam status tersangka.

Atas dasar pemikiran dalam latar belakang dengan mengangkat isu hukum di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji objek penelitian dengan judul “Penetapan Status Tersangka pada Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perzinahan (Studi Kasus di Polres Halmahera Utara)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kepastian hukum penetapan anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana perzinahan yang mana secara bersamaan anak didudukkan sebagai korban pada perkara tindak pidana persetubuhan?
2. Bagaimanakah analisis yuridis kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 284 KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis kepastian hukum penetapan anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana perzinahan yang mana anak secara bersamaan anak didudukkan sebagai korban pada perkara tindak pidana persetubuhan.
2. Untuk menganalisis secara yuridis kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 284 KUHP.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain terdiri atas:

1. Secara teoritis; diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan khususnya bagi pengembangan kajian hukum acara pidana pada aspek problematika

penetapan tersangka terhadap diri anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan.

2. Secara praktis; diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai referensi bagi aparat penegak hukum untuk lebih mencermati proses penanganan perkara tindak pidana perzinahan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan dengan memperhatikan aspek kepastian hukum dalam proses penyidikan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian dengan topik “Anak sebagai tersangka pelaku tindak pidana perzinahan” tergolong sebagai kajian yang terbilang sangat jarang untuk dikaji oleh para peneliti. Didasarkan pada pendekatan studi kasus atas penanganan perkara di wilayah hukum Kepolisian Resor Halmahera Utara, penulis mengangkat topik penelitian ini atas dasar problematika yuridis terhadap penetapan anak sebagai tersangka atas tindak pidana perzinahan, namun disisi lainnya si anak didudukkan pula sebagai korban persetubuhan dalam lingkup undang-undang perlindungan anak.

Sepanjang penelusuran penulis hanya menemukan 1 (satu) kajian penelitian Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Kemudian Dilaporkan sebagai Tindak Pidana Perzinahan” yang ditulis oleh Dedy Meidixon Luis pada tahun 2017 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.⁵ Identifikasi permasalahan dalam penelitian

⁵ Dedy Meidixon, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Kemudian Dilaporkan sebagai Tindak Pidana Perzinahan”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hal. 1-149.

tersebut difokuskan pada 2 (dua) hal, yaitu: apakah menurut hukum dapat dibenarkan bahwa laporan atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kemudian dilaporkan lagi sebagai Tindak Pidana Perzinahan?; dan Bagaimanakah sikap serta alasan hukum Penyidik dalam menyelesaikan laporan Tindak Pidana Perzinahan yang sebelumnya telah dilaporkan sebagai Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak telah memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap?.

Dari identifikasi permasalahan dalam penelitian tersebut dapatlah diketahui persamaan dan perbedaan fokus penelitian antara tesis yang dibuat oleh penulis dengan yang dibuat oleh penulis lainnya. Adapun persamaannya terdapat pada pendekatan studi kasus yang ditelaah dalam penelitian. Secara umum, terdapat persamaan kronologis kasus yang dijadikan objek kajian dalam hal menjawab permasalahan yuridis mengenai penetapan tersangka anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada sudut pandang isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian. Jika pada penelitian orang lain, isu hukumnya terbatas pada kajian benar tidaknya dari aspek yuridis pelaporan atas anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan dan sikap penyidik dalam menuntaskan penanganan perkara atas laporan kepada anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan. Maka dalam penelitian penulis sendiri, isu hukum yang diangkat dibatasi pada aspek kepastian hukum dari penetapan anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan dan analisis normatif kedudukan anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 284 KUHP.

Maka dengan demikian, penelitian dari penulis sendiri dengan menggunakan pendekatan studi kasus atas penetapan tersangka pada anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan memfokus permasalahan diantaranya: *pertama*, mengenai kepastian hukum penetapan tersangka pada anak sebagai pelaku tindak pidana perzinahan dalam konteks ketentuan pidana dalam Pasal 284 KUHP yang mana si anak sebelumnya telah didudukan sebagai korban pada tindak pidana persetubuhan berdasarkan undang-undang perlindungan anak; dan *kedua*, dapat tidaknya anak dijadikan sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perzinahan berdasarkan konteks ketentuan pidana dalam Pasal 284 KUHP.

Atas perbandingan pendekatan penelitian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang mendasar antara penelitian penulis sendiri dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lain yang memastikan bahwa penelitian penulis dalam tesis ini mengandung unsur orisinalitas penelitian yang merujuk pada kebaruan dan keunikan yang berbeda dengan kajian penelitian lainnya.